

## **PENGENTASAN MASALAH SOSIAL MELALUI *PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT* GUNA MEMAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

**Siti Saskia Fernandya<sup>1</sup>, Teguh Yuwono<sup>2</sup>, Laila Kholid Al-Firdaus<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Diponegoro

*Email: fernandyasaskia7@gmail.com*

Received: 28 Maret 2022 | Revised: 22 Juni 2022 | Accepted: 23 Juni 2022

*Abstract: People centered development, begins with an understanding of human ecology, which is the center of development attention. Development must place the people at the center of attention and the development process must benefit all parties. Therefore, this study aims to provide an effective understanding related to alleviating social problems through people centered development in order to maximize development. This study uses a literature review research method. The results of the study indicate that large-scale changes in this global era, it can be said that human development is actually faced with complex problems and dilemmas. So, it is necessary to develop Human Resources, such as empowerment in order to improve human quality. This people-centered development model is a new alternative to increase the production output of development to meet the needs of a very large and growing population. Along with today's global development, it must be fully understood that human development is an important agenda with more the amount of attention related to human rights, democratization and civil society. This needs to be taken seriously by the central and local governments in the form of development policies that truly place the community as development actors.*

*Keywords: society; development; social problems*

Abstrak: *People centered development* atau pembangunan yang berpusatkan pada rakyat, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang efektif terkait pengentasan masalah sosial melalui *people centered development* guna memaksimalkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan secara besar-besaran pada era global ini, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia sebenarnya dihadapkan pada permasalahan yang pelik dan dilematis. Maka, diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti pemberdayaan guna meningkatkan kualitas manusia. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*) ini, adalah suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah. Seiring dengan pembangunan global dewasa ini, harus dipahami sepenuhnya bahwa pembangunan manusia menjadi agenda penting dengan semakin besarnya perhatian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, demokratisasi dan *civil society*. Hal ini, perlu direspon dengan serius oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan yang sungguh-sungguh menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Kata Kunci: masyarakat; pembangunan; masalah sosial

## **PENDAHULUAN**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan disini, diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, dimana setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana, lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011).

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan juga berarti suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara umum kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Budiman, 2000). Pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1988). Dalam perkembangan pembangunan, konsep pembangunan mengandung empat makna (Esman, 1991), yaitu: (1) Pembangunan merupakan proses, dalam arti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan, (2) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, karena dipandang sebagai suatu kebutuhan, (3) Pembangunan dilaksanakan secara berencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, dan (4) Pembangunan terkait dengan dimensi modernisasi, dalam arti sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia, dimana manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif ini, manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, tetapi pembangunan harus menciptakan kondisi- kondisi manusia yang bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995).

Pada hakekatnya, ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu: (1) pembangunan sosial (*social development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); (3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*). Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Guna mengetahui pembangunan manusia, bisa digunakan berbagai alat ukur yang antara lain *Human Development Index* atau *Physical Quality of Life Index*. Khusus mengenai *Human Development Index* (Indek Pembangunan Manusia/IPM), merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan pembangunan yang menggunakan pendekatan “pembangunan berpusat pada manusia” atau *People centered development /PCD*. Ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan IPM, yaitu (1) kesehatan, dan panjang umur yang terbaca dari angka harapan hidup, (2) pendidikan yang diukur dari angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah, dan (3) pendapatan yang diukur dari daya beli. Alat ukur pembangunan manusia yang berupa IPM ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik untuk mengetahui derajat pembangunan manusia di Indonesia, karena Indonesia dewasa ini telah mengarahkan pendekatannya pada pembangunan yang berpusat pada manusia.

*People centered development* atau pembangunan yang berpusatkan pada rakyat, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, meningkatnya kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, misalnya longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari Hak Asasi Manusia, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung, merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada rakyat.

Lebih lanjut, tantangan utama dari pembangunan sendiri sebenarnya adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun, pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan adalah seperti pendidikan, peningkatan standar kesehatan, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, dan pemerataan kesempatan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa apa yang disebut sebagai “kehidupan yang lebih baik” itu sangat relatif, di mana harus melibatkan nilai-nilai (*values*) dan pengukuran nilai-nilai (*value judgment*). Dengan demikian, dalam terminologi pembangunan terdapat pengukuran nilai tentang apa yang baik (pembangunan) dan apa yang buruk (keterbelakangan).

Melihat mengenai apa yang harus diperjuangkan dalam pembangunan, dapat diambil satu contoh yaitu soal permasalahan sosial kemiskinan. Seperti yang diketahui, bahwa pembangunan di Indonesia masih belum mencerminkan keadaan layaknya negara yang kaya dan makmur. Dengan kata lain, Indonesia masih bisa dikatakan miskin mengingat tingkat kemiskinannya yang masih cukup tinggi. Padahal, fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia, kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability.

Kemiskinan sendiri terjadi karena adanya keterbatasan modal dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Pada umumnya, pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (*underdevelopment*) selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu

sentralnya. Ada perbedaan pendekatan dalam pembangunan untuk memahami orang miskin. Di satu pihak, ada yang memahami bahwa kemiskinan itu karena kemalasan, sedangkan di pihak lain memahami ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Selanjutnya pemikiran seperti ini diterjemahkan menjadi kurangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar atau kemampuan untuk menuntun dirinya menjadi manusia seutuhnya (Levine & Rizvi, 2005). Akan tetapi, cerita tentang kemiskinan juga tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bahkan sejak Reformasi, setiap pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik, terutama menjelang pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Padahal, di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan acap kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995).

## **METODE PENELITIAN**

Tiap penelitian memerlukan perencanaan, sehingga dibutuhkan suatu desain penelitian. Untuk itu dalam rangka menganalisis pengentasan masalah sosial melalui *people centered development* guna memaksimalkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. *Literatur review* merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Studi literatur dilakukan setelah menentukan topik penulisan dan ditetapkannya rumusan masalah, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Nursalam, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perspektif pembangunan yang menekankan kapasitas pada manusia dan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development*), terus mendapatkan kritikan, tetapi juga banyak yang mengakui sebagai paradigma pembangunan yang menjanjikan. Pasalnya, Indonesia sebagai negara yang dapat dikatakan sudah berkembang, telah melakukan usaha pembangunan sejak Era Reformasi sampai sekarang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwasannya di era liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini dan mendatang, akan menghadapi masyarakat Indonesia pada problematika masalah sosial seperti kemiskinan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, meningkatnya bentuk penyimpangan sosial dan tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya ‘pembelotan sipil’ atau civil disobedience. Semua itu, yang selama ini hanya dipahami samar-samar sebagai fenomena darurat yang bersifat temporer dan berskala kecil, di masa mendatang akan semakin menjadi ciri inheren dari masyarakat dan ekonomi Indonesia (Nasikun, 2011).

Dapat diambil contoh, soal masalah sosial kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi sebaliknya dari pembangunan manusia. Apabila dalam konsep pembangunan manusia ditunjukkan dengan kemajuan manusia atau derajat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka kemiskinan ditunjukkan dengan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, antara pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang masing-masing menempati kutub yang berlawanan. Dengan melihat fakta yang ada, Indonesia masih banyak melahirkan kelompok miskin seperti di daerah perkotaan, dimana hal tersebut merupakan paradoks dari industrialisasi. Industrialisasi yang didengung-dengungkan demi kesejahteraan rakyat, sebenarnya pada saat yang sama juga melanggengkan kemiskinan. Kenyataan semacam ini, bukanlah kenyataan sesaat, tetapi lahir melalui proses sejarah yang amat panjang (Basundoro, 2013). Pada proses sejarah yang panjang itulah, proses bertahan dan melawan dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup terus menerus dilakukan oleh rakyat atau kelompok miskin. Perlawanan rakyat miskin di kota dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup muncul dalam bentuk yang amat beragam, terutama di negara-negara dunia ketiga. Termasuk di Indonesia, dimana kemampuan negara untuk mengelola rakyat atau kelompok miskin di perkotaan masih amat terbatas, serta tingginya angka urbanisasi di kota-kota besar. Demikian halnya, kaum lemah atau kelompok miskin di perdesaan dunia ketiga, pada dasarnya tidak pernah berhenti menentang ketidakadilan yang menimpa diri mereka sebagai akibat dari tindakan dan perilaku yang dilakukan segolongan manusia, baik yang berasal dari dalam masyarakat mereka sendiri maupun kekuatan-kekuatan dari luar masyarakat mereka termasuk dalam hal ini pemerintah dan aparatnya yang memperlakukan mereka secara tidak adil (Sutrisno, 2000). Perasaan diperlakukan tidak adil inilah yang sering memicu timbulnya konflik antar kelompok miskin dengan kelompok-kelompok mapan yang mereka anggap sebagai sumber ketidakadilan tersebut. Selain itu, lahirnya kelompok miskin dan terbatasnya ruang kota telah melahirkan problem baru yang bisa dibilang lebih rumit karena menyangkut ruang untuk hidup bagi mereka. Jika kenyataannya mereka masih bertahan untuk tinggal di kota, maka hal itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kota telah menjadi tempat yang nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal dibandingkan dengan di desa. Kedua, tidak ada pilihan lain selain terus bertahan di kota dengan segala resiko yang harus terus-menerus dihadapi, yaitu bertahan atau melawan demi kelangsungan hidup (*struggle for survival*) di kota (Basundoro, 2013).

Perubahan secara besar-besaran pada era global ini, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia sebenarnya dihadapkan pada permasalahan yang pelik dan dilematis. Di satu sisi, masyarakat berupaya melakukan industrialisasi dengan mengaplikasikan berbagai teknologi mutakhir, padahal kenyataannya, konsekuensi penerapan mesin dan berbagai teknologi lainnya akan semakin mengurangi kesempatan kerja manusia. Sementara itu, di sisi

lain mereka dihadapkan pada masalah kependudukan dimana jumlah penduduknya besar, yang belum dimanfaatkan secara efektif, sehingga keberadaan penduduk ini berada pada titik kritis atau dengan kata lain diibaratkan sebagai beban pembangunan. Masalah penduduk Indonesia pada saat ini, semestinya bukan pada bagaimana menciptakan penduduk dari beban menjadi modal pembangunan, tetapi bagaimana menciptakan manusia yang sama menjadi modal yang lebih berkualitas.

Membangun manusia pembangun, berarti mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki kualitas tinggi. Pengembangan yang dimaksud adalah usaha membina dan mendayagunakan potensi kemanusiaannya, sehingga kemampuan yang dimilikinya dapat dikerahkan baik dalam bentuk tenaga, gagasan, intelektualitasnya guna mencapai taraf hidup yang lebih baik. Di dalam pembangunan manusia, yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan manusia secara universal. Oleh sebab itu, Indonesia yang konsep pembangunan manusianya adalah identik dengan pengurangan kemiskinan, cara investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin. Hal ini dikarenakan, bagi penduduk miskin, aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut akan lebih bermakna pada kehidupan masyarakat, dan juga hakekat pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai fungsi untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktivitas perkapita, investasi sumber daya manusia, investasi fisik dan kesempatan kerja (Aimon, 2012).

Pengembangan Sumber Daya Manusia sendiri pada dasarnya mencakup dua persoalan besar. Dalam hal ini, selain perlunya pengembangan potensi kemanusiaan seperti intelektualitas dan kecerdasan yang dikembangkan melalui prinsip-prinsip teknokratis, juga perilaku, yang dapat mendatangkan implikasi-implikasi moral (seperti krisis humanisme). Jadi, yang perlu di garisbawahi dari dua persoalan tersebut adalah bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia menyangkut masalah peningkatan kualitas manusia, sebagai tenaga kerja dan subjek pembangunan serta implikasi rekayasa teknologis terhadap eksistensi manusia sendiri.

Dengan begitu, pengembangan pemikiran sangat penting dengan disertai memperkenalkan reformasi kebutuhan manusia dalam prioritas pembangunan. Melalui berbagai strategi dan kegiatan yang diprogramkan untuk mendukung pertumbuhan dengan pemerataan, maka prioritas menyediakan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan sangat penting. Dua hal ini bukan hanya sebagai alternatif melainkan prioritas yang harus ditekankan sebagai realisasi dari strategi pembangunan yang diterapkan. Dengan adanya penyesuaian di dalam kedua prioritas tersebut, maka akan dapat diwujudkan perspektif dari paradigma '*People centered development*' (Korten, 1987).

Model pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development*), merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan, yang mana hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People*

*centered development* ), lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Karena itu, pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan. Korten (1993), menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat (*People centered development* ), memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Model pembangunan seperti ini, akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih menjamin pertumbuhan self sustaining capacity masyarakat menuju sustained development (Tjokrowinoto, 1987).

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development* ), adalah asumsi bahwa manusia merupakan sasaran pokok dan sumber paling strategis. Model pembangunan seperti ini, memberikan peranan warga masyarakat bukan hanya sebagai subyek, melainkan lebih sebagai aktor yang menentukan tujuan-tujuannya sendiri, menguasai sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi hidupnya. Meskipun pembangunan yang berpusat pada rakyat mengakui pentingnya pertumbuhan, namun penampilan dari suatu sistem pertumbuhan terutama tidak diukur berdasarkan nilai pertumbuhan yang dihasilkannya, melainkan lebih pada hubungannya dengan seberapa luas masyarakat terlibat di dalamnya dan seberapa tinggi kualitas situasi kerja yang tersedia bagi mereka, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi, negara dengan masyarakat.

Fokus perhatian dari *People centered development* adalah *human growth, well-being, equity* dan *sustainable*. Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah *balanced human ecology*, di mana sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama aktualisasi optimal potensi manusia (Korten, 1984). Perhatian utama dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development* ) adalah pelayanan sosial (*social service*), pembelajaran sosial (*social learning*), pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*) dan kelembagaan (*institutional building*).

Korten (1993), mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu: Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri; Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin; dan Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dengan menggunakan waktu sebagai ukuran dasar perubahan, dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development* ), dibedakan dengan strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang, diperlukan untuk menghancurkan struktur ketimpangan sosial, kelas dan bangsa. Proses ini, termasuk ke dalam pembebasan nasional dari dominasi kolonialisme dan neokolonialisme, pergeseran dari strategi pertanian yang berorientasi ekspor, dan kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional. Strategi jangka pendek didefinisikan sebagai

kebutuhan untuk menemukan cara-cara menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung, dengan membantu masyarakat dalam produksi pangan melalui peningkatan diversifikasi pertanian, sebagaimana juga kesempatan kerja di sektor formal dan informal.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development*), mengidentifikasi kebutuhan dengan kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang, dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.

Kebutuhan praktis yang dimaksud yaitu berbagai kebutuhan dasar manusia. Sedangkan, kebutuhan strategis mencakup kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Menurut Gilbert dan Spect (Sukoco, 1991), setiap manusia secara universal memiliki sejumlah kebutuhan, yaitu *physical needs*, *emotional needs*, *intellectual needs*, *spiritual needs* dan *social needs*. Kemudian, kebutuhan manusia terdiri dari tiga, yaitu (1) kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), di dalamnya mencakup kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan; (2) keperluan sosial (*social needs*), mencakup pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi internal dan eksternal; dan (3) kebutuhan pengembangan diri (*developmental needs*), mencakup tabungan, pendidikan khusus dan akses terhadap informasi.

Perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat, merupakan hal yang sangat penting jika manusia ingin memperoleh keadilan dalam suatu tatanan sosial politik tertentu. Dalam cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development*), melalui strategi pemberdayaan secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lain. Pendekatan ini, berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis manusia secara tidak langsung melalui kebutuhan praktisnya dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis manusia sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis.

Pemberdayaan masyarakatnya pun, tidak hanya dilakukan dengan cara mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, juga terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People centered development*), tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Konsep Welfare State adalah gagasan yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara menyejahterakan warganya melalui program pelayanan, bantuan, jaminan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Welfare



State menurunkan nilai-nilai pembangunan ideologi sosialisme, dimana terdapat prinsip pemerataan dan kesederajatan antar masyarakat dan adanya campur tangan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor-sektor tertentu. Konsep ini, didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Penggagas teori Welfare State adalah Mr. Kranenburg, yang juga menjelaskan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Untuk menerapkan konsep Welfare State, terdapat lima pilar kenegaraan yang wajib dipenuhi yaitu, demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan atas hak asasi manusia (*the human right protection*), keadilan sosial (*social justice*), dan anti diskriminasi (*un-discrimination*).

Konsep Welfare State dikenal berasal dari negara-negara Skandinavia, dimana mereka secara sukses menerapkan konsep Welfare State dan mulai ditiru oleh negara-negara lain di dunia. Welfare State memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan, misalnya layanan kesehatan dan pendidikan dan perorangan dalam bentuk tunjangan. Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh ekonomi campuran Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin. Terdapat empat makna Welfare State yang dimaknai berbeda oleh berbagai negara. Pertama, sebagai tunjangan sosial, dimana kesejahteraan sosial diberikan kepada masyarakat miskin. Penerima kesejahteraan adalah mayoritas masyarakat miskin, pengangguran, dan masalah sosial lainnya, sehingga negara wajib memberikan pertolongan kepada kelompok termarjinalkan yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, sebagai kondisi sejahtera (*well being*), yaitu kesejahteraan sosial sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia, karena kebutuhan akan gizi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendapatannya dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Ketiga, sebagai pelayanan sosial, yang umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Keempat, sebagai Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Terdapat model-model penerapan Welfare State di berbagai macam negara sesuai dengan karakteristik, ideologi, dan budaya negara setempat.

Model Institusional (Universal)

Model institusional ini juga disebut dengan model Universal maupun The Scandinavia Welfare State (dipengaruhi oleh faham liberal). Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark.

### **Model Koorporasi (*Bismarck*)**

Model ini seperti model Institution/universal, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan buruh (pekerja). Dimana, pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara Jerman dan Austria.

### **Model Residual**

Model seperti ini, menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh ideologi Neo-liberal dan pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar, dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini adalah model institusional/universal yang memberikan pelayanan sosial berdasar hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi, seperti yang dijalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek dari pada model institution/universal. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer, diberikan secara ketat dan efisien, serta dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup akan segera diberhentikan. Model ini, dianut oleh negara-negara Aglo-Saxson meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zealand.

### **Model Minimal**

Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini, pada umumnya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki political will terhadap pembangunan dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal dan minimal. Model ini dianut oleh negara-negara latin seperti; Brazil, Italia, Spanyol, Chile, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia.

Dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia, telah jelas tercantum dalam konstitusi UUD 1945 bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial menjadi prioritas tertinggi pembangunan, yaitu dengan menyatakan bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai banyak persoalan di bidang sosial seperti masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan dan sebagainya, kondisi-kondisi ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, kesehatan dan kematian. Oleh sebab itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik

negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, di segala bidang.

Konsep Welfare State sudah diterapkan di Indonesia melalui program jaminan hari tua dan program jaminan kesehatan masyarakat. Dalam penerapannya, Indonesia termasuk dalam kategori model minimalis. Untuk jaminan hari tua, Indonesia menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pensiun. Sistem jaminan kesehatan masyarakat di Indonesia telah menggunakan asuransi menyeluruh melalui BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) sebagai pengelola jaminan. Namun, pelaksanaan asuransi BPJS ini tidak inklusif terhadap seluruh masyarakat. Model minimalis yang diterapkan di Indonesia ditandai dengan hanya memberikan asuransi kesehatan kepada keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan bagi kelompok masyarakat mampu, tidak ada cover dari negara dan mereka harus membayar premi setiap bulan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seiring berkembangnya waktu, konsep pembangunan dinilai semakin kompleks dan semakin tidak terikat. Konsep pembangunan tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini, menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya, pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan.

Pada akhirnya, pembangunan di Indonesia harus bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang damai, tentram, dan tertib, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang bersahabat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Sementara, yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, orientasi pembangunan pada upaya mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat sebagai metode, harus didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan.

Seiring dengan pembangunan global dewasa ini, harus dipahami sepenuhnya bahwa pembangunan manusia menjadi agenda penting dengan semakin besarnya perhatian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, demokratisasi dan civil society. Hal ini, perlu direspon dengan serius oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan yang sungguh-sungguh menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi memang penting, karena pendekatan ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Namun demikian, pendekatan ini tidak mungkin mengabaikan pembangunan manusia, khususnya dalam membangun manusia sebagai investasi sosial jangka panjang. Sehingga, kedua pendekatan ini

mestinya digunakan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sejarah pembangunan telah mencatat, bahwa orientasi yang dominan pada pertumbuhan ekonomi kenyataannya menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kesalahan pemilihan pendekatan pembangunan ini, tentunya tidak boleh terulang lagi, karena akan menambah kesengsaraan masyarakat, terutama generasi penerus masa depan bangsa ini. Hal ini, menuntut reorientasi pemikiran para pengambil keputusan untuk menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir pembangunan, meningkatkan derajat pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan disini, bahwa pembangunan adalah pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Namun, yang terjadi di Indonesia, pembangunan yang dijalankan selama ini ternyata masih fokus pada pertumbuhan ekonomi, dan belum memberikan prioritas yang cukup pada pembangunan manusia sangat berpotensi menciptakan berbagai masalah sosial yang semakin tajam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aimon, H. (2012). Produktivitas, Investasi Sumberdaya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Basundoro, P. (2013). *Pengantar Sejarah Kota*. Ombak Dua.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Esman, M. (1991). *Management Dimensions of Development*. Kumarin Press.
- Korten, D. C. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Studi Pembangunan.
- Korten, D. C. (1987). *Third Generation NGO Strategic: A Key to People-centered Development*.
- Korten, D.C., & Sjahrir. (1993). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Levine & Rizvi. (2005). *Poverty Works and Freedom*. New York: Cambridge University Press .
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 3*. Jakarta: Selemba Medika.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, D. H. (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung: Kopma STKS.
- Tjokrowinoto, M. (1987). *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Todaro, M. (1988). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Glora Aksara Pratama.